

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan inovasi. Sebagaimana amanat dalam Undang-undang Dasar (UUD 1945) yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pengembangan Iptek diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing secara global melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek, reformasi kelembagaan penelitian dan pengembangan yang didukung oleh penguatan infrastruktur sarana dan prasarana Iptek serta fleksibilitas pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Permasalahan pada sektor Iptek tersebut menjadi salah satu isu strategis nasional yang berperan sebagai dasar dalam penentuan arah kebijakan dan strategi. Menurut Maulana et al., (2014: 4) penelitian dan pengembangan adalah pekerjaan intelektual dan kreatif yang memerlukan ruang kreativitas tertentu bagi para peneliti, sehingga produktivitasnya dapat terjaga agar dihasilkan kualitas litbang yang sesuai kaidah serta tidak terlalu dibebankan oleh peraturan yang kaku.

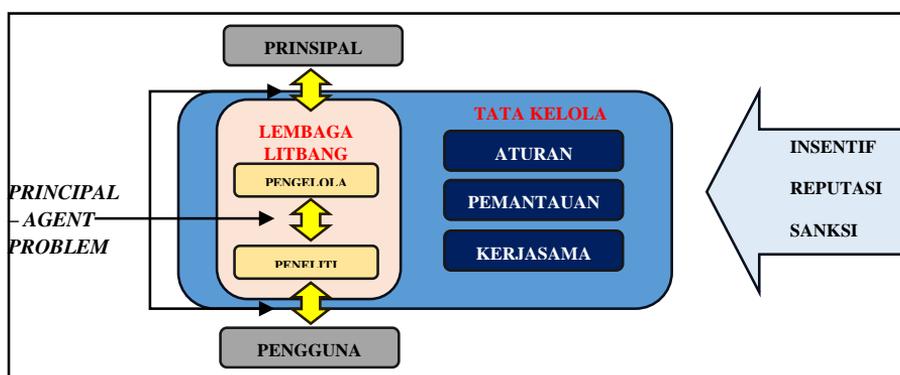
Sebagai badan otonom baru yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan hasil integrasi dari seluruh unit organisasi pelaksana fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia yang ada sebelumnya, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN),

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan beberapa badan penelitian dan pengembangan (litbang) level Kementerian. Presiden mengundang pembentukan BRIN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021, yang selanjutnya diubah menjadi Perpres Nomor 78 Tahun 2021. BRIN mempunyai dua tugas utama yakni menghasilkan inovasi dan invensi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, serta memperbaiki ekosistem riset dan inovasi di Indonesia yang mana di dalamnya juga termasuk melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rendahnya *critical mass* yang disadari oleh BRIN dalam pencapaian target riset dan inovasi yang dilakukan selama ini, tidak hanya disebabkan dari sisi kemampuan SDM tetapi juga disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan infrastruktur riset dan inovasi serta keterbatasan anggaran riset dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adanya integrasi infrastruktur Iptek serta upaya perluasan pembangunan infrastruktur Iptek kedepannya dinilai memiliki urgensi penting untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi riset di Indonesia. Tata kelola merupakan isu strategis dalam lingkup lembaga sektor publik, salah satu penyebab kompleksitas tata kelola khususnya pada lembaga penelitian publik seperti BRIN adalah adanya hubungan asimetris informasi antara prinsipal (penyandang dana) dengan agen (lembaga litbang). Menurut Schubert dan Schmoch (dalam Maulana et al., 2014:3) berpendapat bahwa masalah koordinasi yang sering terjadi dalam tata kelola lembaga litbang disebabkan oleh lembaga litbang itu sendiri sebagai agen yang dianggap tidak mampu oleh prinsipal mengelola dana yang diberika, sehingga rawan untuk disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok menggunakan pola perilaku asimetri informasi.

Menurut Jansen (dalam Maulana et al., 2014:40) Lembaga litbang memiliki kewajiban dalam menjaga kualitas dengan standar-standar dan aturan yang telah ditetapkan beserta sistem evaluasi penelitiannya. Dalam mengadopsi tata kelola, kerjasama menjadi bagian terpenting dalam pertimbangan perancangan penelitian dengan instrumen yang digunakan oleh prinsipal yakni insentif, reputasi, dan sanksi.

Pola hubungan antara tata kelola dengan tiga faktor yang mempengaruhinya sebagaimana dijelaskan di atas dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



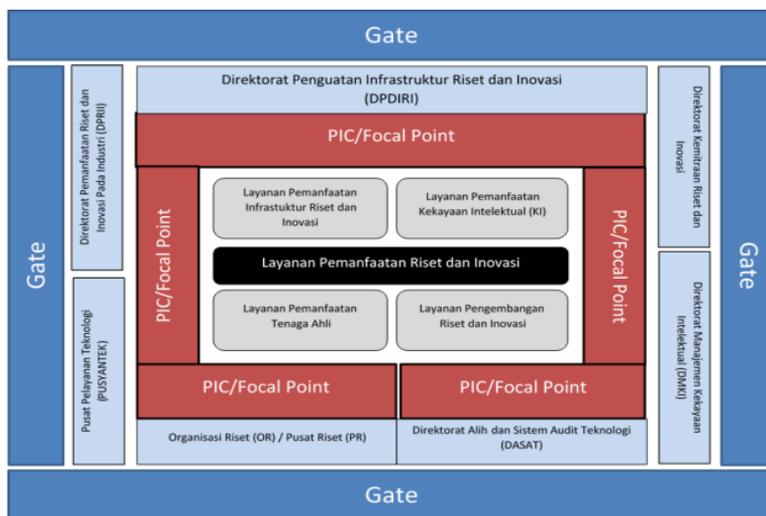
Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Tata Kelola Lembaga Litbang

Sumber: Maulana et al. (2014:41)

Pentingnya kehadiran institusi pengelola riset dan inovasi semakin disadari seiring dengan kebutuhan Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menuntaskan problematika, kesenjangan pembangunan, dan mencari solusi permasalahan pada sektor pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Roos, Pike, dan Kalliokoski (dalam Saksono, 2021) yang menegaskan bahwa urgensi entitas riset membuktikan terjadinya peningkatan akan pentingnya organisasi riset dan teknologi dalam sistem inovasi global. Hal ini dapat dimaknai bahwa BRIN tidak hanya bertransformasi menjadi pengelola fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan seperti sebelumnya (*business as usual*), tetapi kehadirannya dituntut mampu

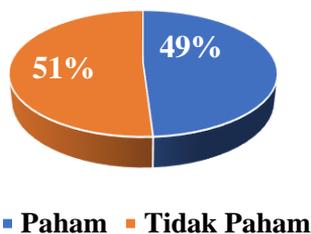
mengubah tata kelola penelitian dan pengembangan secara fundamental dan meningkatkan keterhubungannya dengan sistem inovasi dan daya saing global. Seiring berjalannya dinamika organisasi sektor publik, lembaga penelitian seperti BRIN didorong untuk dapat menerapkan tata kelola yang baik. Salah satunya dengan reformasi birokrasi, yang mana publik menekankan bahwa semua lembaga publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya atas penggunaan anggaran yang diperoleh (Maulana et al., 2014: 1).

Salah satu strategi BRIN dalam rangka meningkatkan kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak eksternal (akademisi, industri, komunitas, dll) dengan menerapkan skema *open platform*. Strategi kebijakan ini dilakukan BRIN melalui penyediaan fasilitas dan SDM riset yang dapat diakses secara terbuka oleh semua pihak seperti akademisi, industri atau swasta, komunitas, pemerintah, dan lainnya. Langkah ini diambil untuk menekan atau meminimalisir pembiayaan riset yang memerlukan anggaran besar dan beresiko tinggi melalui *platform* kerjasama riset ini. Kerjasama (*Cooperation*) adalah adanya keterlibatan secara pribadi diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal (Sunarto, 2000). Dengan menerapkan model *open platform*, peluang kerjasama bagi pihak eksternal semakin terbuka luas dari berbagai pintu unit layanan yang ada (*multiple gate*). Menurut Budiwati et al., (2023) Skema *multiple gate* yang saat ini diterapkan BRIN dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Skema Multiple Gate dalam Strategi Open Platform
 Sumber: Budiwati et al., (2023)

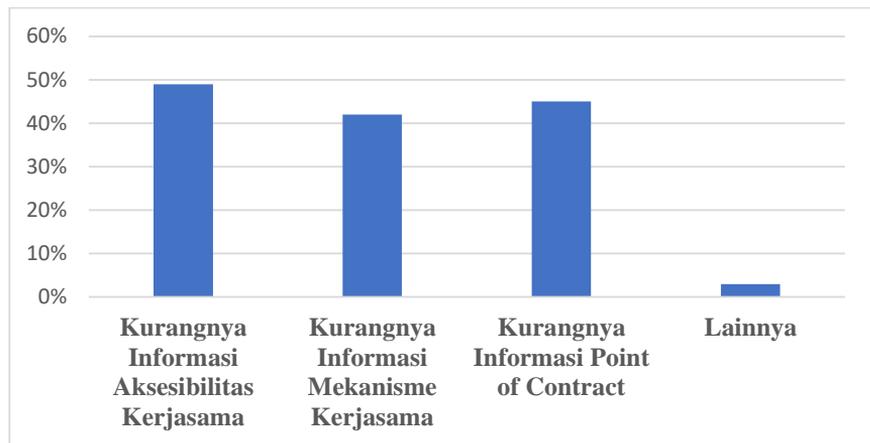
Namun dalam upaya tersebut tentunya menghadapi hambatan dan tantangan, Dari hasil survei tentang persepsi mitra industri dalam kerjasama riset inovasi dengan BRIN yang dilakukan oleh terhadap 65 responden mitra industri, didapatkan hasil bahwa sebanyak 51% mitra industri belum memahami aksesibilitas kerjasama dan 49% yang sudah memahami sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.3 Tingkat Pemahaman mitra industri akan aksesibilitas kerjasama riset dan inovasi BRIN

Sumber: Survei Industri atas Tata Kelola Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, 2022

Selanjutnya, mitra industri menghadapi beberapa kendala dalam inisiasi kerjasama, antara lain kurangnya informasi akan aksesibilitas/pintu masuk, mekanisme kerjasama serta *point of contact* sebagaimana dalam gambar di bawah ini:



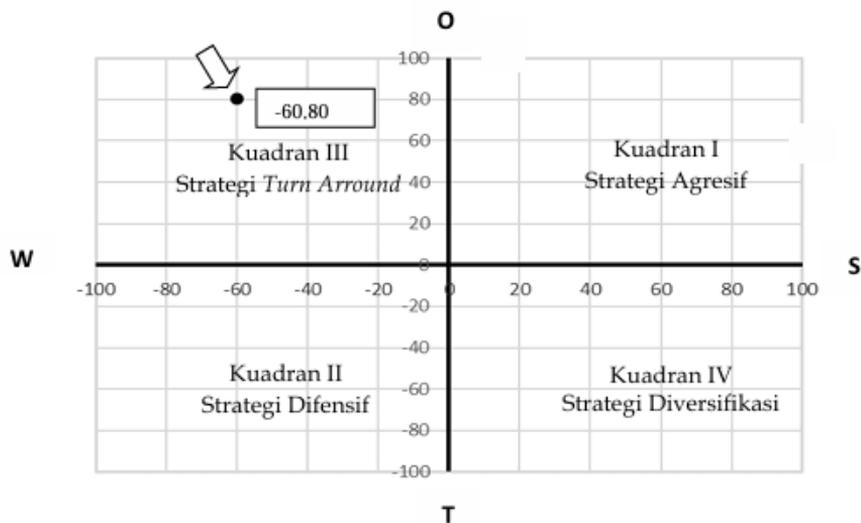
Gambar 1. 4 Kendala Mitra dalam Inisiasi Kerjasama BRIN

Sumber: Survei Industri atas Tata Kelola Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, 2022

Berdasarkan 2 (dua) grafik di atas dapat disimpulkan bahwa selama kehadiran BRIN yang baru menginjak usia 3 tahun belum optimal dan signifikan dalam menjaring dan menjadi daya tarik kerjasam riset dan inovasi di berbagai bidang.

Berdasarkan hasil survei tersebut juga dijadikan rujukan penelitian untuk mengetahui bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh BRIN dalam penguatan tata kelola kerjasama. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Budiwati et al., (2023) dengan menggunakan metode analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi tata kelola kerjasama riset dan inovasi BRIN saat ini berada pada koordinat kartesius (-60, 80) atau terletak pada kuadran III. BRIN memiliki banyak kelemahan, namun BRIN memiliki peluang yang besar dalam perbaikan tata kelola pemanfaatan riset dan inovasi pada

industri. Skema *open platform* terhadap minat industri bekerjasama dalam pemanfaatan riset dan inovasi, dalam implementasinya belum optimal. Hal ini dilihat dari masih adanya sejumlah kendala, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal kendala ditemui dari peran dan target kerja yang beririsan antara unit-unit yang memiliki fungsi layanan, yang disebabkan belum ditetapkannya proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) intra dan antar unit layanan. Dari sisi eksternal, mitra merasa bingung atas beberapa informasi terkait layanan kerjasama pemanfaatan riset dan inovasi, yang meliputi aksesibilitas/pintu masuk, mekanisme kerjasama serta *point of contact (PIC/Focal Point)*. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak yaitu berkurangnya minat industri dalam menjalin kerjasama pemanfaatan riset inovasi dengan BRIN. Strategi yang dirumuskan nantinya, difokuskan untuk meminimalisir kelemahan yang dimiliki dalam memanfaatkan peluang tersebut dengan strategi yang dinamai *Turn Around*.



Gambar 1. 5 Posisi Tata Kelola Kerjasama Pemanfaatan Riset dan Inovasi di BRIN Dalam Diagram Analisis SWOT

Sumber: Budiwati et al., (2023)

Implikasi daripada integrasi LAPAN ke BRIN yang mana berubah nama menjadi Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) dirasakan cukup mempengaruhi kinerja dan capaian output riset di bidang penerbangan dan antariksa. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil kinerja dari tahun 2019 pada saat era LAPAN hingga 2023 era ORPA yang sudah menjadi bagian dari BRIN, berikut perbandingan hasil kinerja dan capaian output pada bidang penerbangan dan antariksa:

Tabel 1. 1. Perbandingan Hasil Kinerja dan Capaian Output pada Bidang Penerbangan dan Antariksa 2019 – 2023

Tahun Indikator	LAPAN		ORPA – BRIN		
	2019	2020	2021	2022	2023
Produk Inovasi	5	16	23	52	8
Publikasi Ilmiah Terindeks	-	378	398	247	248
Sitasi atas Publikasi	900	1.965	2.968	1.808	1.369
Kekayaan Intelektual	43	99	42	53	83

Sumber: Laporan Kinerja, data diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 4 (empat) indikator utama yang setiap tahunnya menjadi target organisasi dan harus dicapai, dalam 5 (lima) tahun terakhir grafiknya fluktuatif. Pada awal masa transisi dari LAPAN ke ORPA-BRIN yakni tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan kinerja dari 3 (tiga) indikator yakni produk inovasi, publikasi ilmiah terindeks, dan sitasi atas publikasi. Namun pada tahun berikutnya yakni saat sudah terintegrasi dengan BRIN dari 2022 hingga 2023 masing-masing terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami penurunan dan 2 (dua) indikator yang mengalami peningkatan kinerja. Jika disimpulkan dari data yang dihimpun di atas bahwa dengan terintegrasinya LAPAN ke dalam BRIN yang selanjutnya menjadi ORPA dirasa belum optimal dan belum terdapat perubahan yang signifikan sesuai ekspektasi.

Hasil analisis penulis dari laporan evaluasi kinerja menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab atas hasil kinerja dan capaian output yang dihasilkan sebagaimana dijelaskan pada tabel dan paragraf di atas. Faktor penentu utama adalah dinamika organisasi yakni dampak daripada pengintegrasian lembaga ke dalam BRIN yang mana juga berpengaruh besar terhadap pengambilan kebijakan strategis organisasi. Sedangkan faktor-faktor lainnya adalah (1) Sumber daya anggaran (alokasi/pagu anggaran) yang secara otomatis mempengaruhi target kinerja; (2) Sumber Daya Manusia (SDM Periset dan Administrasi); (3) Sumber daya fasilitas penunjang (peralatan, bahan, dan laboratorium); dan (4) Aksesibilitas dengan mitra/pihak eksternal dalam penajakan kerjasama riset. Berikut uraian perbandingan sumber daya anggaran dari tahun 2019 pada saat era LAPAN hingga 2023 era ORPA yang sudah menjadi bagian dari BRIN:

Tabel 1. 2. Perbandingan Sumber Daya Anggaran pada Bidang Penerbangan dan Antariksa 2019 – 2023

Tahun Anggaran	LAPAN		ORPA – BRIN		
	2019	2020	2021	2022	2023
Pagu Anggaran	Rp.840.881.697.000,-	Rp.682.841.245.000,-	Rp.776.039.418.000,-	Rp.25.000.000.000,-	Rp.13.227.500.000,-
Realisasi Anggaran	Rp.796.286.547.322,-	Rp.547.960.410.540,-	Rp.555.029.095.954,-	Rp.23.188.634.943,-	Rp.13.015.284.241,-
Persentase Penyerapan	94,70%	80,25%	71,52%	92,75%	98,40%

Sumber: Laporan Kinerja, data diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap sumber daya anggaran antara era LAPAN hingga 2023 era ORPA yang sudah menjadi bagian dari BRIN sehingga menjadi faktor yang dominan mempengaruhi hasil kinerja dan capaian output organisasi. Pada tahun 2021 sampai dengan akhir tahun anggaran yang dipakai adalah anggaran LAPAN, meskipun secara resmi nomenklatur LAPAN menjadi ORPA berubah sejak September 2021 berdasar Peraturan BRIN Nomor 5

Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa.

Terkait kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal juga mengalami perubahan, hal tersebut terjadi sebagaimana diuraikan sebelumnya disebabkan oleh dinamika perubahan kebijakan yang semula secara otonomi dapat diambil dan diputuskan oleh Kepala LAPAN yang kemudian saat ini berada pada Kepala BRIN melalui Kedeputian Pemanfaatan Riset dan Inovasi. Artinya Kepala ORPA secara otonomi tidak mempunyai kewenangan memutuskan perjanjian kerjasama dengan mitra riset/pihak eksternal. Kewenangan yang dapat dilaksanakan adalah meliputi penjajakan dan konseptualisasi kerjasama melalui pengoptimalisasi pusat riset dibawah ORPA. Adapun secara riwayat, perbandingan capaian kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal yang telah dilakukan di bidang penerbangan dan antariksa dari tahun 2019 pada saat era LAPAN hingga 2023 era ORPA yang sudah menjadi bagian dari BRIN sebagai berikut:

Tabel 1. 3. Perbandingan Kerjasama pada Bidang Penerbangan dan Antariksa 2019 – 2023

Tahun Mitra	LAPAN		ORPA – BRIN		
	2019	2020	2021	2022	2023
Perguruan Tinggi	2	3	9	4	7
BUMN	1	2	3	2	4
Swasta/Industri	-	1	1	-	1
Instansi Pemerintah (Pusat dan/atau Daerah)	12	6	7	8	30
Internasional	29	5	4	9	35
Total Kerjasama	44	17	24	23	77

Sumber: Laporan Kinerja, data diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kerjasama di bidang penerbangan dan antariksa dalam 5 (lima) tahun terakhir fluktuatif. Kerjasama yang masih rendah adalah dengan pihak swasta/industri, sedangkan paling tinggi adalah kerjasama internasional. Hal ini terjadi sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menurut penelitian yang dilakukan oleh Budiwati *et al.* (2014) masih rendahnya aksesibilitas mitra riset/pihak eksternal dalam peninjauan kerjasama riset menjadi faktor rendahnya kerjasama riset antara ORPA dengan sektor swasta/industri. Sebaliknya, ORPA unggul dalam kerjasama internasional dikarenakan disiplin ilmu dan fokus riset yang diampu memiliki kualitas dan jejaring internasional yang kuat dari para perisetnya. Namun pada kerjasama sektor dalam negeri dengan lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah masih kuat, hanya saja perlu tindak lanjut dan komitmen memajukan riset serta penguatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi (hilirasasi).

Upaya BRIN dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja tidak berhenti sampai disitu saja, artinya bahwa masih terdapat program-program maupun skema lain yang diinisiasi sebagai strategi kebijakan. Salah satunya adalah dengan kebijakan Rumah Program yang mana peneliti dan perekayasa atau yang saat ini disebut periset tidak lagi bergantung pada sumber pendanaan internal APBN yang diberikan pada setiap level unit eselon-1 maupun eselon-2. Rumah Program merupakan langkah strategis BRIN dalam meningkatkan kompetensi SDM, konsep Rumah Program memiliki pengertian bahwa pada setiap level Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Organisasi Riset (OR) menerapkan sistem seleksi terbuka proposal riset yang nanti akan diberikan pendanaan dari masing-masing pemilik Rumah Program yakni di masing-masing Organisasi Riset dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di masing-masing Rumah Program.

Dalam setiap judul proposal riset, peserta seleksi terbuka merupakan kerjasama dari periset internal BRIN maupun eksternal BRIN (akademisi, masyarakat maupun swasta/industri) dengan kualifikasi dan keahlian/kepakaran di bidangnya masing-masing yang mampu dan berkomitmen terhadap pencapaian target kinerja baik berupa purwarupa/model, publikasi ilmiah internasional, kekayaan intelektual, dan sebagainya. Proses seleksi hingga pelaksanaan riset inilah yang dinamakan *Call for Research Collaboration* yang diterapkan pada masing-masing Organisasi Riset di lingkup BRIN. Berikut gambaran pada saat sosialisasi *Call for Research Collaboration* pada salah satu Rumah Program yang telah dilakukan oleh masing-masing Organisasi Riset di lingkup BRIN:

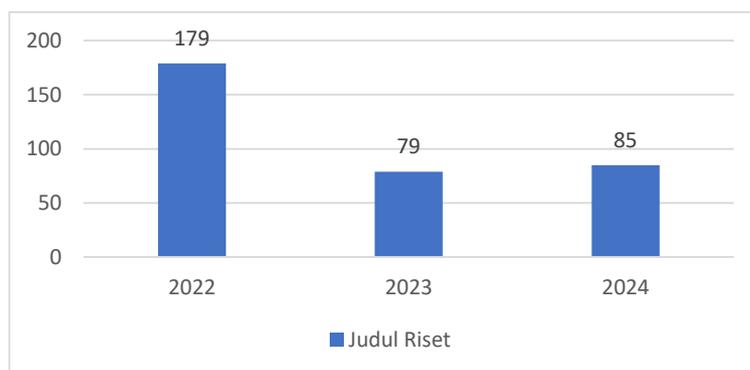


Gambar 1. 6 Sosialisasi Call for Research Collaboration Rumah Program Penerbangan dan Antariksa BRIN

Sumber: Arsip Penulis 13 November 2023

Pelaksanaan *Call for Research Collaboration* Rumah Program yang nantinya diharapkan berkontribusi maksimal dalam capaian output kinerja pada setiap Organisasi Riset di lingkup BRIN ini sudah berjalan 3 (tiga) kali yang dimulai dari tahun 2022.

Dalam kegiatan *Call for Research Collaboration* yang telah dilakukan tahun dari tahun 2022 hingga 2024 terdapat proposal riset yang lolos seleksi dan didanai oleh ORPA untuk dapat berkontribusi mencapai target output kinerja baik berupa purwarupa/model, publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, dan sebagainya. Berikut rincian jumlah judul yang lolos dalam *Call for Research Collaboration* Rumah Program Penerbangan dan Antariksa dari tahun 2022 hingga 2024:



Gambar 1. 7 Jumlah Judul Riset Call for Research Collaboration ORPA Tahun 2022 – 2024

Sumber: Surat Keputusan Kepala ORPA tentang Judul dan Tim Pelaksana Kolaborasi Riset, data diolah

Grafik tersebut menunjukkan penurunan jumlah judul riset pada ORPA dari 2022 sampai 2024. Hal ini berbanding lurus dengan menurunnya pagu anggaran riset dari 2022 sampai 2024, namun pada 2 (dua) tahun terakhir pelaksanaan *Call for Research Collaboration* Rumah Program Penerbangan dan Antariksa secara umum kinerja ORPA terjadi peningkatan. Peningkatan capaian kinerja tersebut disebabkan oleh faktor tabungan riset yang dimiliki oleh periset, artinya penelitian yang belum selesai pada tahun sebelumnya dapat terbit dan diklaim pada tahun berikutnya seperti halnya publikasi ilmiah yang menunggu dari proses awal *submit* hingga *published*.

Secara teoritis, kerjasama riset dan inovasi yang melibatkan aktor-aktor non-negara dalam studi administrasi publik dikenal sebagai pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*), menekankan kerjasama yang menguntungkan antara sektor publik dan swasta di bawah prinsip-prinsip yang baik. Menurut Sink (dalam Subarsono, 2016:177) kerjasama kolaboratif merupakan sebuah proses usaha mencari solusi yang dilakukan secara bersama oleh setiap organisasi yang mempunyai kepentingan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Mekanisme kerja yang dikembangkan dalam manajemen kolaboratif adalah mekanisme kerja fungsional, dimana masing-masing pihak melaksanakan kegiatan berdasarkan pada fungsi yang diembannya dalam penyelesaian masalah publik tertentu, sesuai dengan pembagian kerja yang disepakati bersama (Dwiyanto, 2012:303). Sementara Ansell dan Gash (dalam Supriyanto, 2023) menjelaskan *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. Amabile et al. (2001) menyatakan ada tiga dimensi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kolaborasi riset, yaitu: (1) profesi partisipan, (2) afiliasi antar institusi/ lembaga, dan (3) level organisasi dari kolaborasi. Sonnenwald (2007) kemudian menambahkan dua dimensi lagi, yaitu: disiplin ilmu dan geografis. Melihat dimensi ini maka sebuah kolaborasi riset harus mencakup beberapa peneliti akademik walaupun bukan peneliti juga dapat melakukan kolaborasi.

Dalam era yang semakin terbuka, disruptif, dan tanpa batas sekarang ini, peneliti selain dituntut untuk senantiasa menghasilkan karya secara mandiri juga dituntut untuk dapat melakukan kerjasama riset dengan peneliti lainnya di dalam negeri sehingga riset yang dilakukan dapat lebih komprehensif dan

diharapkan mampu mendorong dan memperkuat terjadinya kolaborasi dengan para peneliti di luar negeri dalam posisi yang setara, seimbang, dan kontributif. Hal ini dipandang perlu mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat lintasdisiplin, sehingga kerjasama riset atau riset kolaboratif diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas riset dan pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah publikasi dari para peneliti Indonesia dalam jurnal ilmiah bereputasi Internasional. Pentingnya kolaborasi riset tersebut mendorong berbagai inisiatif untuk mengembangkan kolaborasi diantara individu-individu peneliti agar mereka dapat bersama-sama melakukan kolaborasi riset, seperti adanya pusat riset unggulan yang mengakomodasi kelompok penelitian antar berbagai disiplin ilmu. Berbagai kebijakan pemerintah juga digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan *link* antara ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui upaya kolaborasi riset di sektor tertentu antara perguruan tinggi/lembaga litbang dengan industri.

Kinerja mendeskripsikan tentang tahap pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang secara kelembagaan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan untuk menyelesaikan kewajiban utama dan fungsinya dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pengukuran kualitas kinerja dilakukan untuk menilai hasil kerja atau prestasi yang dicapai oleh organisasi, tim, atau individu. Pengukuran ini akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kualitas kinerja, serta perencanaan dan proses pelaksanaan kualitas kinerja. Dengan demikian, pengukuran atau evaluasi kualitas kinerja memungkinkan langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja di waktu yang akan datang.

Menimbang dengan konteks permasalahan dan isu strategis yang dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk kemudian mengangkat permasalahan dan isu tersebut dalam sebuah penelitian berjudul **“Evaluasi**

Kinerja Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa pada Program Kolaborasi Riset Pasca Kebijakan Integrasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana evaluasi kinerja Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa pada Program Kolaborasi Riset Pasca Kebijakan Integrasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional?
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam evaluasi kinerja Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa pada Program Kolaborasi Riset Pasca Kebijakan Integrasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis evaluasi kinerja Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa pada Program Kolaborasi Riset Pasca Kebijakan Integrasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor apa saja yang menghambat dalam evaluasi kinerja Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa pada Program Kolaborasi Riset Pasca Kebijakan Integrasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- A. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan khasanah keilmuan bagi mahasiswa, akademisi, pembaca, praktisi, dan elemen lain khususnya dalam kajian administrasi publik perihal evaluasi kinerja Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa pada Program Kolaborasi Riset Pasca Kebijakan Integrasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 2) Bagi Magister Administrasi Publik, hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi dalam sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan administrasi publik, khususnya pada fokus kajian evaluasi kinerja organisasi/lembaga publik untuk mencapai target kinerja organisasi yang akuntabel.

B. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh wawasan dan pengalaman tentang evaluasi kinerja Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, bagaimana strategi antar aktor berkolaborasi dalam kerjasama riset berbagai disiplin bidang ilmu pengetahuan, mendapatkan pemahaman tentang batasan aktor non-pemerintah dalam tata kelola pemerintahan di sektor publik, serta peneliti mendapatkan pengalaman bagaimana harusnya pemerintah menjajaki kerjasama riset agar dapat dimanfaatkan;
- 2) Bagi Badan Riset dan Inovasi Nasional, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan rekomendasi tentang bagaimana pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja unit kerja dalam program kolaborasi riset agar dapat dimanfaatkan serta memberikan pertimbangan tentang pelibatan aktor non-pemerintah;
- 3) Bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, dapat mengetahui informasi bagaimana proses dalam evaluasi kinerja Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa pada Program Kolaborasi Riset Pasca

Kebijakan Integrasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional sekaligus memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa ketika kolaborasi riset dikelola dan dilaksanakan secara professional dengan strategi yang tepat akan memberikan dampak positif ke pembangunan nasional khususnya bidang Iptek.